

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian publik saat ini adalah perubahan iklim secara signifikan akibat dari pemanasan global. Perubahan iklim yang tidak menentu dan kenaikan suhu secara global menjadi salah satu dampak akibat adanya pemanasan global. Kenaikkan suhu secara global tidak lain disebabkan oleh perusahaan-perusahaan industri yang ada di dunia. Adanya revolusi industri membuat perubahan besar dan sangat signifikan terhadap perkembangan industri dunia. Dampak dari revolusi industri tersebut pada masa sekarang adalah adanya efek samping dimana terjadi peningkatan gas rumah kaca yang lepas ke udara. Selama 50 tahun terakhir, lebih dari 95% gas rumah kaca dihasilkan dan menyebabkan peningkatan suhu bumi (National Aeronautics and Space Administration, 2020). Fenomena meningkatnya gas rumah kaca ini membuat negara-negara berunding dan bersatu untuk mengurangi efek dari gas rumah kaca tersebut dengan membuat sebuah perjanjian.

Perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara tersebut adalah Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC). Perjanjian ini diadakan pada tahun 1992, yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi gas rumah kaca yang lepas ke atmosfer. Sebuah perjanjian tentu membutuhkan protokol atau prosedur agar dapat berjalan dengan baik. Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian internasional yang merupakan amandemen terhadap UNFCCC (UNFCCC, 1998). Protokol Kyoto pada tahun 1997 menandakan pertemuan ketiga yang dilakukan untuk membahas tentang gas rumah kaca. Terdapat 6 jenis gas rumah kaca, yaitu gas karbon dioksida (CO_2), gas nitrogen dioksida (N_2O), gas metana (CH_4) dan 3 jenis gas freon yaitu sulfur heksafluorida (SF_6), perfluorokarbon (PFCs), dan hidrofluorokarbon (HFCs) (Kementrian Lingkungan Hidup, 2017). Pada 16 Februari 2005, Protokol Kyoto baru resmi berlaku dikarenakan harus mendapat ratifikasi dari negara-negara terlebih dahulu. Sebanyak 141 negara meratifikasi Protokol Kyoto dan berkomitmen

untuk mengurangi gas rumah kaca. Sepuluh tahun kemudian, pada 12 Desember 2015, negara-negara kembali berkumpul untuk memberikan respon yang lebih baik terhadap peningkatan perubahan iklim dan agar kenaikan suhu bumi tetap di bawah 2 derajat *Celcius*. Pertemuan yang diikuti oleh 195 negara ini kemudian dinamakan Paris Agreement karena terjadi di Paris dan ditandatangani pada 22 April 2016 yang merupakan peringatan Hari Bumi. Indonesia yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengikuti dan menandatangani perjanjian ini (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Pada tahun 2015, Indonesia merupakan penyumbang karbon dioksida terbesar ke 4 di dunia (Dunne, 2019). Gas karbon dioksida yang juga disebut sebagai emisi karbon, adalah limbah akibat proses produksi yang dilakukan oleh industri perusahaan, penambangan batu bara, atau kebakaran hutan yang terjadi. Meningkatnya industri di Indonesia diikuti dengan meningkatnya tingkat emisi karbon yang lepas ke udara. Pada tahun 2019, tingkat emisi karbon di Indonesia menginjak angka tertinggi sepanjang sejarah yaitu sebesar 37 miliar ton (Emisi karbon dioksida global capai rekor tertinggi tahun 2019, 2019). Menanggapi fenomena ini, Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian Paris Agreement mengeluarkan Undang Undang Nomor 16 tahun 2016 yang berisi tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Sebelumnya, Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 yang berisi tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca untuk mengurangi tingkat emisi karbon. Pasal 4 peraturan ini menyatakan tentang pelaku yang dapat melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca. Pihak yang dimaksud tersebut salah satunya adalah pelaku usaha. Pelaku usaha saat ini merupakan pemain terbesar yang menyumbang emisi karbon ke atmosfer, maka dari itu pemerintah dan para *stakeholder* juga memperhatikan masalah ini. Pentingnya masalah emisi karbon membuat *stakeholder* memperhatikan kinerja perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya kinerja keuangan saja, namun juga kinerja lingkungannya (Irwhantoko dan Basuki, 2016).

Perusahaan dapat memperlihatkan kinerja lingkungannya lewat pengungkapan-pengungkapan lingkungan dan juga tindakan terhadap lingkungan. Pengungkapan emisi karbon merupakan sarana bagi perusahaan untuk dapat menunjukkan kepada *stakeholder* akan kinerja dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Pengungkapan emisi karbon masih dilakukan secara sukarela dan tidak mempunyai aturan khusus terhadap pelaporannya. Namun, banyak sekali keuntungan yang didapat perusahaan jika mengungkapkan emisi karbon. Keuntungan tersebut adalah mendapat legitimasi dari *stakeholder* dan masyarakat, menghindari risiko dan ancaman terhadap perusahaan yang menghasilkan gas rumah kaca, seperti meningkatnya biaya operasional, mengurangi permintaan, risiko terhadap reputasi perusahaan, proses hukum, serta denda dan pinalti (Berthelot dan Robert, 2011). Dalam teori legitimasi, disebutkan bahwa masyarakat luas berpengaruh bagi perusahaan untuk menentukan alokasi sumber keuangannya. Hal ini mengakibatkan perusahaan memberikan perhatian lebih terhadap kinerja lingkungannya (Ghozali dan Chariri, 2014:441). Adanya pengungkapan emisi karbon menandakan bahwa perusahaan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan hal ini memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup perusahaan karena masyarakat sudah memiliki legitimasi terhadap perusahaan (Deegan, Rankin, dan Tobin, 2002). Luas pengungkapan emisi karbon ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tipe industri (Probosari dan Kawedar, 2019), kinerja lingkungan (Saptiwi, 2019), media *exposure* (Jannah dan Muid, 2014), dan juga reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) (Irwhantoko dan Basuki, 2016).

Faktor pertama adalah tipe industri yang menggunakan Global Industry Classification Standard (GICS) sebagai standar untuk menilai apakah industri tersebut termasuk ke dalam industri intensif karbon atau industri non-intensif karbon dimana industri intensif karbon menandakan bahwa perusahaan menghasilkan lebih banyak emisi karbon, sedangkan industri non-intensif karbon menandakan bahwa perusahaan menghasilkan lebih sedikit emisi karbon dalam melakukan aktivitas usaha (MSCI dan S&P Global, 2018). Perusahaan yang termasuk industri intensif karbon dinilai melepaskan lebih banyak emisi karbon ke udara dibanding dengan industri non-intensif

karbon. Perusahaan yang dikategorikan sebagai industri yang intensif karbon cenderung mengungkapkan emisi karbon karena aktivitas usaha yang dilakukan selalu diawasi oleh masyarakat dan pemerintah (Probosari, 2019). Tidak seperti penelitian Probosari, penelitian yang dilakukan oleh Saptiwi (2019) menyatakan bahwa industri yang intensif mengeluarkan lebih banyak emisi karbon belum sepenuhnya melakukan pengungkapan emisi karbon dikarenakan masih bersifat sukarela.

Faktor kedua adalah kinerja lingkungan yang merupakan pengukuran hasil yang dilakukan setelah menerapkan sistem manajemen lingkungan untuk melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek lingkungan perusahaan yang berupa kebijakan, sasaran, dan target lingkungan (International Organization of Standardization 14004, 2016). Kinerja lingkungan yang rendah cenderung tidak melakukan pengungkapan informasi agar tidak memperburuk citra perusahaan. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik akan cenderung untuk melakukan pengungkapan informasi untuk mendapat legitimasi dari masyarakat dan meningkatkan citra perusahaan (Saptiwi, 2019). Namun, penelitian Selviana (2019) menyatakan bahwa apabila kinerja lingkungan sudah baik, maka perusahaan merasa tidak perlu mengungkapkan informasi karena menganggap bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban lingkungannya.

Faktor ketiga adalah media *exposure* yang merupakan peran media dalam membantu pemangku kepentingan mengambil keputusan karena mengandung informasi yang penting seperti pengungkapan lingkungan (Wang, Song, dan Yao, 2013). Publikasi media juga meningkatkan tekanan yang dirasakan oleh perusahaan karena berhadapan langsung dengan publik dan mempertaruhkan citranya. Perusahaan akan semakin berusaha meningkatkan kinerjanya dan mengungkapkan informasi sebanyak mungkin agar pandangan masyarakat tetap baik. Apalagi, kondisi saat ini membuat *stakeholder* dan masyarakat hanya memperhatikan kinerja keuangan saja, namun juga kinerja lingkungan perusahaan. Media pengungkapan emisi karbon dapat berupa media cetak, ataupun berupa media digital, seperti *website* perusahaan (Cahaya, 2016). Apabila perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan seperti emisi karbon

dan disorot oleh media, perusahaan akan mendapat kepercayaan jangka panjang dari *stakeholder* dan masyarakat (Jannah dan Muid, 2014). Namun, penelitian Probosari (2019) menyatakan bahwa tidak ada kaitan antara media *exposure* dengan pengungkapan emisi karbon dikarenakan pengungkapan tersebut dapat menimbulkan risiko plagiarisme atau malah menjadi *boomerang* bagi perusahaan dan menurunkan citranya.

Faktor keempat adalah reputasi KAP yang merupakan cerminan dari prestasi dan kepercayaan masyarakat terhadap auditor. Auditor merupakan peran penting dalam hubungan antara perusahaan dengan publik, dimana auditor memberikan nilai lebih terhadap informasi yang diungkapkan oleh perusahaan. KAP besar atau yang sering disebut dengan *Big Four* dinilai memberikan hasil audit yang lebih baik dan memberi saran untuk melakukan pengungkapan lebih banyak, seperti pengungkapan emisi karbon (Craswell dan Taylor, 1992). Hal ini membuat pengguna informasi menaruh kepercayaan lebih pada perusahaan yang diaudit oleh *Big Four* untuk mengambil keputusan (Wardhani, 2019). Namun, penelitian Irwhantoko dan Basuki (2019) menyatakan bahwa reputasi KAP tidak memiliki keterkaitan dengan pengungkapan emisi karbon. Hal ini dikarenakan Kantor Akuntan Publik bukan merupakan lembaga yang berhak untuk menilai pengungkapan emisi karbon.

Dapat dilihat bahwa hasil penelitian dari keempat faktor diatas masih belum konsisten. Oleh karena itu, faktor tipe industri, kinerja lingkungan, media *exposure*, dan reputasi KAP digunakan kembali pada penelitian ini dengan harapan bahwa hasil yang didapat akan lebih konsisten. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel kontrol, yaitu profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Ketiga variabel kontrol ini diharapkan dapat membantu peneliti memperoleh hasil yang lebih baik dan konsisten dari penelitian terdahulu. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019. Perusahaan manufaktur digunakan mengingat banyaknya sektor yang menghasilkan kadar emisi karbon lebih tinggi dari perusahaan lain dalam menjalankan aktivitas industrinya. Tahun 2016-2019 digunakan karena pada tahun 2016, Indonesia

menandatangani perjanjian Paris Agreement hingga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, serta digunakan juga karena merupakan tahun terbaru sehingga informasi yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Apakah tipe industri memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
2. Apakah kinerja lingkungan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
3. Apakah media *exposure* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
4. Apakah reputasi KAP memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh tipe industri terhadap pengungkapan emisi karbon.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh media *exposure* terhadap pengungkapan emisi karbon.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh reputasi KAP terhadap pengungkapan emisi karbon.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Sebagai referensi yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang serupa dengan penelitian ini, terkait dengan faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai acuan bagi perusahaan untuk semakin memperhatikan keadaan lingkungan sekitar dan melakukan pengungkapan-pengungkapan lingkungan sehingga informasi dapat tersampaikan secara lebih lengkap kepada para pengguna informasi.
- b. Sebagai pertimbangan bagi pengguna informasi, terutama investor untuk menentukan investasi pada perusahaan. Perusahaan yang mengungkapkan emisi karbon cenderung menunjukkan keberlangsungan hidup yang lebih panjang. Oleh karena itu, investor diharapkan lebih memperhatikan perusahaan yang mengungkapkan emisi karbon saat memberikan investasinya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang yang menjadi masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara praktis maupun akademis, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti teori legitimasi, teori *stakeholder*, pengungkapan emisi karbon, tipe industri, kinerja lingkungan, media *exposure*, dan reputasi KAP; penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini; pengembangan hipotesis; dan model penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian; identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel baik variabel independen maupun dependen; jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini; metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik penyampelan; serta analisis data yang digunakan untuk menguji penelitian ini.

BAB 4 ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data yang diuji, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.